



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HARDI**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
3. NHK : **829702**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.335.000.000**

1. Tanah Seluas 1750 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 90.100.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA / MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 100 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 TR M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 10.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 287.721.340**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.723.321.340**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.723.321.340

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.